

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil dari kerja praktik ini adalah rancangan dan simulasi penerapan Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa pada Desa Bumi Jaya. Sistem ini dirancang untuk menjawab masalah yang selama ini dihadapi perangkat desa, yakni kesalahan pendataan, duplikasi penerima, keterlambatan distribusi informasi, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan bansos. Menurut (Harinin et al., 2020), sistem informasi administrasi yang terintegrasi dapat meminimalisasi potensi duplikasi data dan mempercepat proses pelayanan publik di tingkat desa.

Tahap awal pelaksanaan adalah observasi lapangan. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa perangkat desa masih mengandalkan buku register manual untuk mencatat penerima bantuan. Proses ini membutuhkan waktu lama dan sering menimbulkan perbedaan data antara arsip desa dengan data pusat. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Prasetyo et al., 2022), yang menjelaskan bahwa sistem manual dalam pendataan bansos menimbulkan inkonsistensi data antara desa dan dinas sosial kabupaten.

Setelah dilakukan identifikasi masalah, tim kerja praktik merancang sistem berbasis database yang memungkinkan perangkat desa memasukkan data penerima bantuan secara digital. Sistem ini memiliki fitur validasi NIK sehingga tidak ada data ganda yang masuk. Penerapan validasi ini sangat penting mengingat permasalahan utama bansos sering disebabkan oleh penerima ganda. Menurut penelitian (Noviarani & Chotijah, 2021), validasi

berbasis identitas tunggal seperti NIK dapat meningkatkan akurasi data bantuan sosial hingga 90%.

Hasil implementasi awal menunjukkan bahwa perangkat desa lebih mudah dalam melakukan input data. Dengan antarmuka yang sederhana, perangkat desa dapat memasukkan data nama, NIK, alamat, dan jenis bantuan yang diterima. Data tersebut secara otomatis tersimpan di database desa dan dapat dicetak menjadi laporan. Selain itu, laporan juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis bantuan, sehingga mempermudah kepala desa dalam melakukan monitoring. Hal ini sesuai dengan pendapat (Zaliluddin et al., 2020), yang menyatakan bahwa penyajian laporan digital secara otomatis akan mempercepat pengambilan keputusan pemerintah desa.

Fitur lain yang berhasil diuji adalah dashboard monitoring. Dashboard ini menampilkan jumlah penerima bantuan berdasarkan kategori (PKH, BLT-DD, BPNT) secara real-time. Dengan fitur ini, kepala desa dapat memantau jumlah penerima tanpa harus memeriksa arsip manual. Keunggulan dashboard digital ini juga ditegaskan oleh (Mukhtar et al., 2021), yang menyatakan bahwa dashboard berbasis data real-time mempermudah pimpinan desa dalam mengambil keputusan strategis dengan cepat.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur transparansi data, di mana daftar penerima bantuan dapat diekspor ke format PDF atau Excel untuk kemudian dipublikasikan di papan informasi desa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai siapa saja penerima bantuan sosial, sehingga menekan potensi kecurigaan dan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggraeni & Uzaimah, 2024), yang menyatakan bahwa

transparansi dalam penyaluran bansos terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hasil simulasi penerapan sistem ini juga memperlihatkan bahwa proses pencetakan laporan bulanan menjadi lebih cepat. Jika sebelumnya perangkat desa membutuhkan waktu sekitar 3–4 hari untuk menyiapkan laporan bansos, dengan sistem baru laporan dapat dicetak hanya dalam hitungan menit. Efisiensi ini didukung oleh pernyataan (Idrus & Zakiyah, 2022), yang menjelaskan bahwa otomatisasi laporan melalui sistem informasi mampu menghemat waktu hingga 80% dibanding metode manual.

Selain hasil teknis, kerja praktik ini juga menghasilkan dampak non-teknis, yaitu peningkatan pemahaman perangkat desa tentang pentingnya teknologi informasi. Melalui pelatihan singkat yang dilakukan, perangkat desa mulai terbiasa menggunakan komputer untuk mengelola data bansos. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Menurut penelitian (Kurniawan et al., 2021), pemberdayaan perangkat desa dalam penggunaan teknologi informasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi e-government di pedesaan.

Secara keseluruhan, hasil kerja praktik ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya. Sistem ini tidak hanya membantu perangkat desa, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menghadirkan informasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dari hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu menjawab kebutuhan perangkat desa. Dengan adanya validasi berbasis NIK, masalah data ganda dapat diminimalisasi secara signifikan. Hal ini memberikan dampak positif karena bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Penerapan fitur ini sejalan dengan teori Database Management System (DBMS) yang menekankan pentingnya integrasi data dalam sistem administrasi.

Selain itu, efisiensi yang diperoleh dalam pencetakan laporan membuktikan bahwa otomatisasi sistem mampu mengurangi beban administrasi perangkat desa. Waktu yang sebelumnya habis untuk pencatatan manual dapat dialihkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan keuntungan teknis, tetapi juga manajerial dalam meningkatkan produktivitas perangkat desa.

Transparansi juga menjadi aspek penting yang dihasilkan dari penerapan sistem ini. Publikasi daftar penerima bansos secara digital mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya program bantuan. Hal ini mendukung prinsip good governance yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, potensi konflik akibat ketidakjelasan data dapat ditekan.

Namun, penerapan sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi. Meskipun sudah dilakukan pelatihan singkat, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan agar sistem dapat digunakan secara konsisten.

Selain itu, infrastruktur teknologi seperti komputer dan jaringan internet juga perlu diperkuat untuk memastikan sistem berjalan optimal.

Secara umum, pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang diujicobakan di Desa Bumi Jaya mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintahan desa. Walaupun masih terdapat kendala teknis dan non-teknis, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, bahkan direplikasi di desa-desa lain di Kecamatan Candipuro maupun wilayah Lampung Selatan.